

**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021 - 2026**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN NGORO
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	3
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Ngoro	7
2.2	Sumber Daya Kecamatan Ngoro	8
2.3	Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngoro	10
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Ngoro	14
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	15
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Ngoro	15
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	16
3.3	Penentuan Isu-Isu Strategis	20
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	22
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ngoro	22
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	25
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	30
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	37
BAB VIII	PENUTUP	38

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Rencana Strategis Kecamatan Ngoro Tahun 2021 - 2026 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto tahun 2021 - 2026 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Mojokerto yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, September 2021



Drs. MUJIB, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19650809 199312 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang).

Perencanaan Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Kecamatan Ngoro yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Ngoro Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Mojokerto. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kantor Kecamatan Ngoro dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

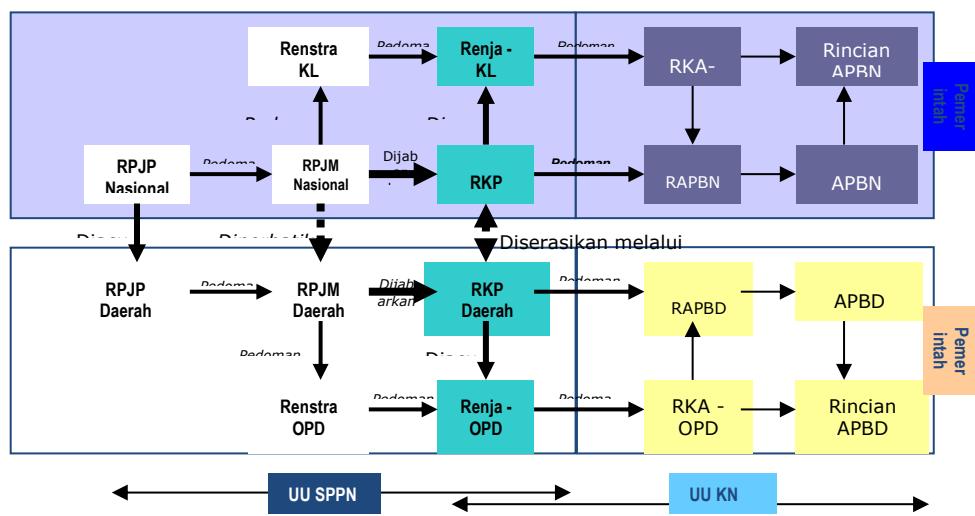
Secara umum Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni : (1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai

dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Ngoro yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ngoro . Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ngoro dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
29. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan Renstra Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Mojokerto untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Mojokerto.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto selama 5 tahun mendatang
6. Meningkatkan pelayanan secara prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Ngoro ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngoro . Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai

permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Penjelasan Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Ngoro, proses penyusunan Renja Kecamatan Ngoro, keterkaitan antara Renstra Kecamatan Ngoro dengan RPJMD dan Renstra Kecamatan Ngoro

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Ngoro

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

**4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ngoro Kabupaten
Mojokerto**

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

Dengan diberlakukannya Undang-Undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daeraahnnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatnya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Ngoro didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-

- undangan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

1. Camat.
2. Sekretariat
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan
6. Seksi Pembangunan
7. Seksi Kemasyarakatan
8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
9. Seksi Pelayanan

Untuk tugas dan fungsi dari Kecamatan Ngoro adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Tugas:

Membantu Camat dalam melaksanakan sebagian tugas kecamatan untuk mengkoordinasikan seksi-seksi, merencanakan operasional, mengelola, mengendalikan dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

- a. Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;

- c. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. Menyusun bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- e. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- f. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Tugas :

- a. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;
- b. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
- c. Menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan keuangan;
- d. Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- e. Melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
- f. Menyusun laporan keuangan;
- g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris

4. Seksi Pemerintahan

Tugas :

- a. Menyusun program penyelenggaraan pemerintahan umum, desa, kelurahan, keagrariaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Melakukan pembinaan keagrariaan;
- c. Melakukan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilu;
- e. Melakukan pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan umum, desa dan kelurahan;
- f. Melakukan bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan;
- g. Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat.

5. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Tugas :

- a. Menyusun bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Instansi Vertikal dan pihak-pihak lain dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. Menyusun program ketenteraman dan ketertiban serta potensi perlindungan

- masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana;
- c. Melakukan penegakan terhadap perundang-undangan daerah;
 - d. Melakukan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
 - e. Melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. Menyusun bahan koordinasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tugas yang berada di lingkungan kecamatan dibidang perlindungan masyarakat;
 - g. Melakukan pemberdayaan organisasi dibidang perlindungan masyarakat;
 - h. Melakukan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang berada di wilayah Kecamatan;
 - i. Melakukan tanggap darurat bencana di wilayah Kecamatan;
 - j. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - k. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Pembangunan

Tugas :

- a. Menyusun program penyelenggaraan perekonomian masyarakat, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup dan fisik prasarana;
- b. Melakukan pemberdayaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informasi dan kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
- c. Melakukan pembinaan lingkungan hidup;
- d. Melakukan pembinaan fisik prasarana;
- e. Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja, instansi vertikal dan pihak-pihak lain dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Melakukan pengaturan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat.

7. Seksi Kemasyarakatan

Tugas :

- a. Menyusun program penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;

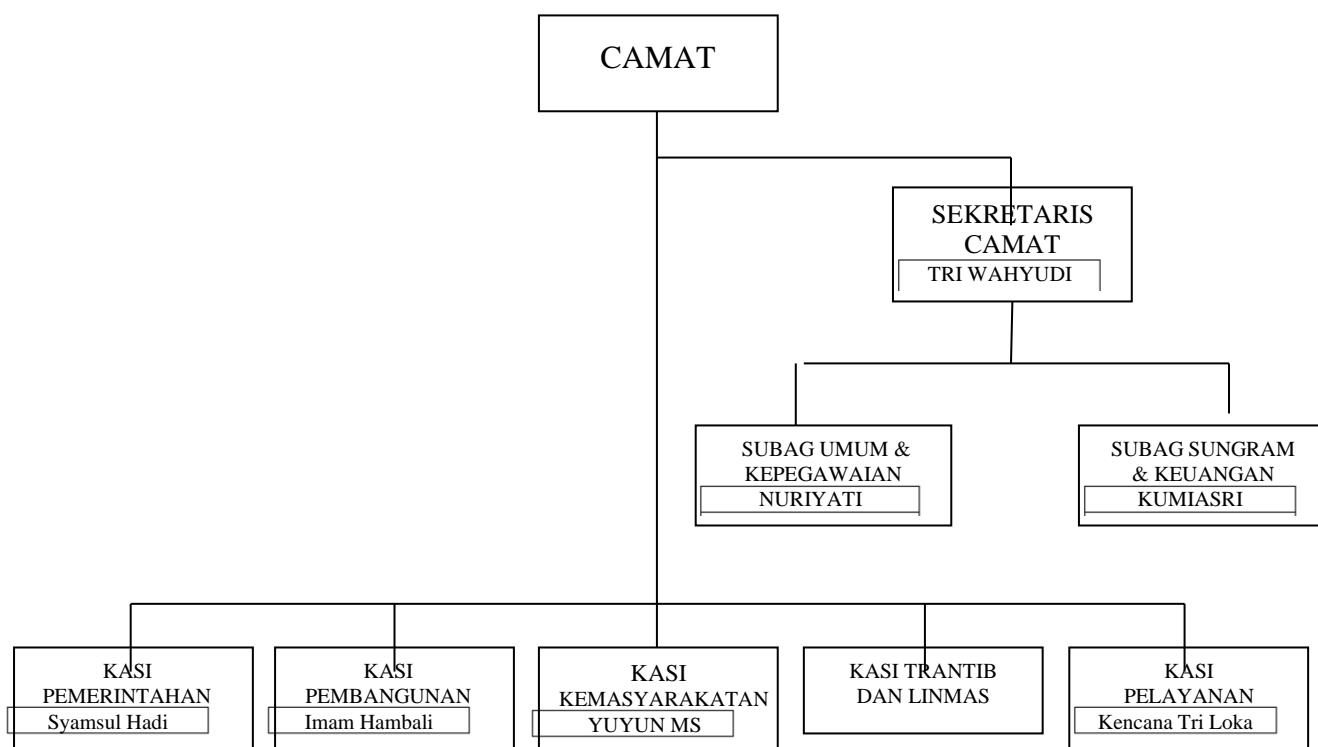
- b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
- c. Menyusun bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan;
- d. Melakukan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
- e. Melakukan kewaspadaan pangan dan gizi di lingkup kecamatan;
- f. Melakukan fasilitasi pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan di lingkup kecamatan;
- g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

8. Seksi Pelayanan

Tugas :

- a. Melakukan dan memproses pelayanan administrasi dan perizinan di tingkat Kecamatan;
- b. Menyusun petunjuk teknis tentang standar pelayanan kecamatan;
- c. Melakukan penerimaan dan meneliti berkas dari pemohon pelayanan administrasi dan perizinan;
- d. Menyusun bahan koordinasi dan kerjasama pelayanan;
- e. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- f. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

**Bagan 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO**



Proses penyusunan mulai dari pengumpulan data dan informasi hingga tersusunnya dokumen perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwadahi dalam bentuk kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. Selain itu Kecamatan Ngoro juga berkoordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto

Sumber daya Kecamatan Ngoro yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur

3 Tabel sdm

No	Uraian	jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
I	Pegawai PNS			
II	Pegawai THL	2	3	
III	Tingkat Pendidikan PNS :			
	1. SLTA			
	2. D-3			
	3. D-4			
	4. S1			
	5. S2			
IV	Golongan Kepangkatan PNS			
	1. II a			
	2. II b			
	3. II c			
			
	...			
			
	9. IV a			
	10. IV b			
V	Agama			
	islam			
	katolik			
	budha			
	hindu			
	lainnya			
	Pejabat struktural			
	Fungsional umum/Staf			

1. Berdasarkan Status Kepegawaian

Sumber daya manusia/aparatur yang tersedia di Kecamatan Ngoro berjumlah 29 orang terdiri dari 24 PNS dan 5 orang tenaga honorer, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Data Pegawai Pada Kecamatan Ngoro Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2021 (Sumber : Data Kepegawaian Kec. Ngoro)

No	JABATAN	PNS	Honorer
1	Struktural	7 Orang	-
2	Pelaksana / Staf	17 Orang	5 Orang

Keberadaan Honorer di Kecamatan Ngoro diperlukan untuk menangani tugas dan pekerjaan yang tidak terisi oleh PNS yang ada.

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari 24 (Dua Puluh Empat) orang PNS dan 5 orang Honorer di Kantor Kecamatan Ngoro dengan komposisi berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.2

Tingkat Pendidikan Pegawai Kecamatan Ngoro Tahun 2021

(Sumber : Data Kepegawaian Kec. Ngoro/Bezetting 2021)

No	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sarjana (S-2)	2 orang
2	Sarjana (S-1)	11 orang
3	SLTA/MA/Sederajat	16 orang

Dari jumlah 29 personil tersebut 55% berpendidikan SLTA/MA/Sederajat, 38% berpendidikan Sarjana, dan 7% tingkat Pasca sarjana. Latar belakang disiplin ilmu aparatur kecamatan Ngoro beberapa orang sudah sesuai dengan batas minimal Analisis Beban Kerja yang ada, hal ini merupakan kekuatan bagi Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

Tabel 2.3

Komposisi Sumber Daya Aparatur berdasarkan Golongan

(Sumber : Data Kepegawaian Kec. Ngoro dan Bezetting 2021)

No.	Golongan	Jumlah		
		L	P	Total
1	IV	1	-	1
2	III	5	8	13
3	II	9	1	10

4	I	-	-	-
	Jumlah	15	9	24

Sumber daya aparatur di kecamatan Ngoro terdiri dari golongan II, III dan IV, namun perbedaan ini tidak menimbulkan kesenjangan diantara satu sama lain sehingga satu sama lain dapat menjalin kerjasama yang baik demi kelancaran pelaksanaan tugas. Sumber Daya Aparatur Kecamatan Ngoro dapat terangkum sepihalknya Tabel dibawah ini :

Tabel Sumber Daya Manusia / Aparatur Kecamatan Ngoro

No	Uraian	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
I	Pegawai PNS	15	9	
II	Pegawai THL	2	3	
III	Tingkat Pendidikan PNS :			
	1. SLTA	12	3	
	2. D-3	0		
	3. D-4	0		
	4. S1	3	4	
	5. S2	1	1	
IV	Golongan Kepangkatan PNS			
	1. II-a			
	2. II-b			
	3. II-c			
	4. II-d			
	5. III-a			
	6. III-b	3	2	
	7. III-c	1	2	
	8. III-d	1	2	
	9. IV-a	1	0	
	10. IV-b	0	0	
V	Agama			
	Islam	16	8	
	Katolik			
	Budha			
	Hindu			
	lainnya			
	Pejabat struktural	6	2	
	Fungsional umum/Staf	12	4	

3.1.1 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Ngoro terdiri dari:

- Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Jalan Airlangga No. 106 menurut Buku Inventaris meliputi :

Tabel 2.4
Daftar Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Ngoro
(Sumber : Data Aset dan Inventaris kantor Kec. Ngoro 2021)

No.	URAIAN	JUMLAH	KET.
1	Gedung Kantor	1 unit	3 lantai
2	Pendopo	1 unit	
3	Rumah Dinas Camat	1 Unit	
4	Papan Nama / neon box	1 unit	
5	Station Wagon	1 unit	
6	Sepeda Motor	3 unit	2 proses Penghapusan
7	Sepeda Motor (Kades)	19 unit	
8	Sepeda Motor (Babinsa& Babinkamtibmas)	38 unit	
9	Meja pelayanan	2 unit	
10	Kursi tunggu	2 unit	
11	Kursi Pelayanan	6 Unit	
12	Rak	1 unit	
13	Almari Kayu	1 unit	
14	Almari Kaca	2 Unit	
15	Filling kabinet	3 unit	
16	Komputer	2 Unit	
17	Laptop	10 Unit	
18	Printer	7 unit	
19	Scanner	2 unit	
20	Meja kerja	22 unit	
21	Kursi rapat	120 unit	
22	Meja rapat	6 Unit	
23	Kursi Kerja	26 unit	
24	Televisi	2 unit	
25	Pesawat telepon	2 unit	
26	Kursi ruang tamu	3 unit	
27	AC	11 unit	
28	Kipas Angin	4 unit	
29	Sound system	2 unit	
30	Loud Speaker	2 unit	
31	Mesin ketik	1 unit	
32	Barcode scaner	2 unit	
33	Finger print	2 unit	
34	Lemari Es	1 unit	
35	Tempat tidur	2 unit	
36	Proyektor	2 unit	
37	Layar Proyektor	2 unit	
38	Arco	1 unit	

3.2 Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Guna memudahkan pengukuran pencapaian kinerja maka sebuah indikator perlu diterapkan dalam setiap perencanaan. Indikator

kinerja akan menunjukkan sejauh mana realisasi dari target sebuah program maupun kegiatan dapat terlaksana.

Capaian indikator kinerja Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2016-2021 sudah cukup bagus, hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah direncanakan dipastikan dapat terlaksana dan mendapatkan pendanaan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Untuk mengetahui target dan realisasi Kecamatan Ngoro dari tahun 2016 – 2021 tertuang pada tabel T-C.23 dibawah ini.

Tabel T-C.23
Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngoro 2016-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Nilai Indeks Pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan				75	76	77				75	76	77				100%	100%	100%			
2	Persentase pelayanan umum dan perijinan (PATEN) yang terlayani sesuai SP							75%						83%	84%					106%		
3	Persentase peningkatan intensifikasi PBB				3%	3%	2%	1%			3%	3%	2%	2,77%						2,77%		
4	Persentase PATEN yang terlayani sesuai SP								80%	82%					84%	85%					100%	100%
5	Persentase Rekomendasi								83%	84%					84%	86%					100%	100%

hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2016-2021 sudah cukup bagus (tidak ada kesenjangan/gap pelayanan), semua target yang ditetapkan berhasil tercapai.

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

- adanya sumber dana yang cukup dari APBD
- Terdapat komitmen yang kuat dari aparatur Kecamatan Ngoro untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian
- tersedianya SDM yang memadai di Kecamatan Ngoro baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya.

TC.24

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Ngoro Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021**

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Belanja Operasi	3.074.570.000	2.436.14.000	2.437.352.000	3.284.703.960	3.335.826.710	4.000.976.517	2.865.337.568	2.108.206.501	2.027.512.385	2.843.990.280	2.788.152.215		93,20	86,54	86,37	86,58	83,58		0,02	-6,07
Belanja Pegawai	2.347.735.000	2.177.409.000	2.060.562.000	2.772.595.000	2.779.269.000	3.409.664.813	2.170.986.290	1.859.197.559	1.662.558.667	2.351.214.188	2.248.960.098		92,47	80,85,	84,69	80,80	80,92		0,03	0,007
Belanja Barang dan Jasa	726.835.000	258.705.000	376.790.000	512.108.960	556.557.710	557.873.856	694.351.278	249.008.942	364.953.718	492.776.092	539.192.117		95,53	96,25	96,86	96,23	96,88		-0,05	-0,05
Belanja Modal	28.000.000	10.000.000	158.700.000	56.000.000	104.800.000	71.167.256	27.250.000	10.000.000	153.970.000	56.000.000	103.480.000		97,32	100,02	97,02	100,74			0,30	0,31
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.000.000	10.000.000	158.700.000	56.000.000	104.800.000	71.167.256	27.250.000	10.000.000	153.970.000	56.000.000	103.480.000		97,32	100,02	97,02	100,74			0,30	0,31

Tabel T-C.24 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto antara tahun 2016 s/d 2021 dalam kisaran 83-100%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Ngoro sudah sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto cukup wajar, pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain :

- Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target
- Kemampuan tim pengelola anggaran yang memadai baik Bendahara, PPTK maupun Pejabat Penata Usahaan Keuangan di Kecamatan Ngoro.

Sedangkan penghambat terserapnya sebagian kecil anggaran adalah

- Adanya Jabatan yang kosong pada tahun ke – 1 sampai ke – 5 sehingga kegiatan belum optimal.
- Adanya penyerapan yang memang tidak bisa 100% seperti perencanaan seperti penyediaan jasa komunikasi dan listrik dan Belanja Pegawai berupa Gaji PNS.

3.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD merupakan hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan OPD. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto:

- Tantangan :
 1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan jabatannya;
 2. Berkurangnya produk layanan yang diberikan di Kecamatan;
 3. Anggaran yang diberikan kepada kecamatan Ngoro masih relative kecil dibandingkan dengan OPD lain ataupun dibandingkan dengan Kecamatan Lain.
 4. Perkembangan sistem informasi perencanaan dan keuangan berbasis Teknologi yang dinamis dengan waktu yang cepat;
- Peluang :
 1. Komitmen bersama seluruh aparatur Kecamatan untuk meningkatkan pelayanan
 2. Terdapat sarana teknologi di setiap seksi dan bagian.
 3. Terbentuknya inovasi pelayanan baik internal maupun eksternal
 4. Perbaikan SOP yang berkelanjutan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

KECAMATAN NGORO

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkret dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ngoro dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) Rendahnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya.
- b) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan;
- c) Kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- d) Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan ;
- e) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah ;
- f) Belum siapnya petugas pelayanan dan masyarakat untuk masuk ke era digitalisasi ;

- g) Kondisi ekonomi dan ketentraman wilayah yang belum stabil dari wabah virus;
- h) Masih sedikitnya peran serta wanita dalam pembangunan wilayah;
- i) Belum adanya Peraturan Daerah di Kabupaten Mojokerto yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan level Kabupaten sampai level Desa;
- j) Belum terintegrasinya aplikasi PATEN dengan data kependudukan Dispendukcapil;
- k) Belum ada anggaran yang dikhkususkan untuk pembiayaan Inovasi;
- l) Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dari Desa sampai ke Dinas Pengampu;

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Perioritas dan Sarana
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum semua pelayanan masyarakat dapat terlayani sesuai dengan Standar Pelayanan	Kompetensi pemberi layanan / petugas masih kurang	- Kurangnya profesionalitas petugas pelayanan - Petugas pelayanan belum memahami SOP yang baru di review
2	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kecamatan yang masih kurang	Masih adanya desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa belum tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-udangan	Tumpang tindihnya aturan yang menjadi acuan bagi Desa dalam menjalankan administrasi pemerintahannya
			Terdapat multi tafsir dari peraturan yang berlaku antara kecamatan dengan desa
			Masih kurangnya kualitas SDM aparatur Desa
		Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal	- Kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban masih kurang
			- Koordinasi dilakukan hanya dalam keadaan insidentil saja
			- Minimnya koordinasi dengan Linmas di wilayah kecamatan
		Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	- Kurangnya koordinasi antara Lembaga atau organisasi masyarakat dengan kecamatan

			<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga dan organisasi masyarakat di pedesaan kurang bisa berjalan dengan mandiri -
		Belum optimalnya jaring pengaman sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang kuatnya filter data yang masuk
			<ul style="list-style-type: none"> - Masih terdapat sistem nepotisme di level pemerintah Desa
			<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya controlling terhadap PKH, TKSK maupun aparatur desa yang menangani data

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya.

Pernyataan menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka dijabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan
2. Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan
4. Pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan

Kecamatan Ngoro sebagai salah satu OPD di Kabupaten Mojokerto turut menyokong misi yang ke tiga yaitu ;

**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel,
Bersih,Transparan**

Melihat identifikasi permasalahan di Kecamatan Ngoro dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Ngoro yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

▪ Faktor Pendorong :

- a) Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
- b) Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- c) Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

▪ Faktor Penghambat :

- a) Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;
- b) Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
- c) Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;
- d) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

3.3 Penentuan Isu-isu strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 yakni:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhhlak Mulia
2. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas, cerdas (smart) dan bermanfaat
3. Pengentasan masyarakat miskin dan yang termarginalkan
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif
5. Peningkatan sumber daya fisik/ infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas dengan dukungan IT

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Kecamatan Ngoro menetapkan **Tujuan** yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : **Meningkatnya kualitas pelayanan publik.** Tujuan tersebut selaras dengan Misi III RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 : “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan**”. Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Dan Transparan Serta Optimalisasi Penerimaan PAD Melalui Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi.

Kecamatan Ngoro merupakan salah satu OPD yang mendukung sasaran ke 2 ”Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran IKM.

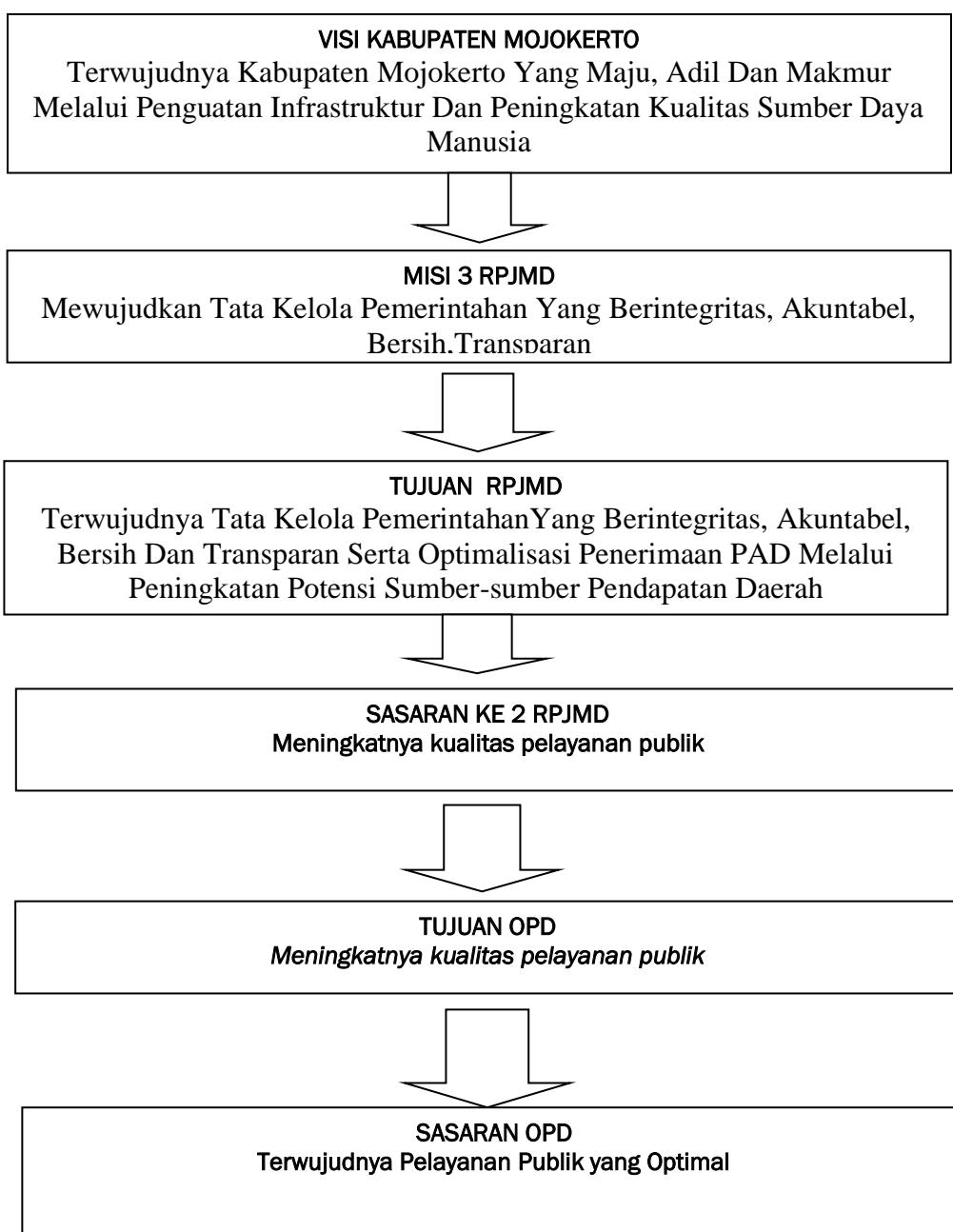
Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngoro, dalam hal ini Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Ngoro menetapkan **sasaran strategis** :

1. **Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah**
2. **Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal.**

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026 dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto ditunjukkan pada gambar 4.2 berikut ini:

Gambar 4.2
Keterkaitan RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto



Tujuan tersebut diatas dicapai melalui pencapaian sasaran sebagai berikut:

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No .	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Nilai IKM	80	82	83	84	85	86
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80	82	83	84	85	86
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	NA	61	63	64	65	67

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, maka penting untuk membangun alternatif-alternatif strategi dan kebijakan Kecamatan Ngoro . Alternatif- alternatif strategi dan kebijakan yang dibangun di dalam Renstra Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 ini menggunakan dua metode analisis yaitu SWOT dan Balanced Score Card (BSC). Analisis SWOT digunakan untuk menemukan berbagai alternatif strategi yang mungkin dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran; sedangkan untuk memilih alternatif strategi mana yang paling tepat digunakan (efektif dan efisien), dari berbagai alternatif strategi yang dihasilkan melalui SWOT, kita menggunakan metode Balanced Score Card (BSC). Berikut ini adalah analisis SWOT untuk menentukan strategi yang akan digunakan Kecamatan Ngoro .

Tabel 5.1
Analisis SWOT

		KEKUATAN	WEAKNESS
ISU STRATEGIS	Ketersediaan Anggaran untuk Pelaksanaan Program	Masih Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana	
	Struktur Organisasi dan Tupoksi Organisasi yang Jelas	Masih Minimnya Kapasitas Aparatur dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah	
	Motivasi Bekerja Pegawai yang Kuat	Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga	
	Peningkatan Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi di Organisasi	Sarana dan Prasarana Aparatur dan Administrasi Perkantoran yang Belum Optimal	
PELUANG	Kurangnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah		
	Teknologi dan Informasi Perencanaan Berbasis Web yang Berkembang Pesat	STRATEGI S-O : Menerapkan pelayanan aparatur Kecamatan Ngoro yang efektif dan efisien	
ANCAMAN	Dukungan dari Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam Perencanaan Pembangunan	STRATEGI W-O : Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Ngoro	
	Adanya kompetisi dalam pemberian pelayanan publik antar OPD dan antar Daerah	STRATEGI S-T : Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Ngoro	
	Kontrol Masyarakat, Media dan LSM yang Tinggi dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintahan	STRATEGI W-T : Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian / kajian dalam pengambilan kebijakan daerah	
	Tingginya Presure dari Legeslatif dalam Proses Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah		

Beberapa strategi yang diperoleh dari hasil analisis SWOT tersebut di atas, selanjutnya dipetakan dalam empat perspektif BSC, yang menjelaskan juga tentang kebijakan dan program yang akan dilaksanakan berdasarkan strategi-strategi yang telah dipilih. Pemetaan dengan menggunakan BSC ini menghasilkan 5 (lima) kebijakan umum, yang merupakan jembatan antara strategi dengan program, yang selanjutnya dirinci menjadi kegiatan-kegiatan. Pemetaan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.2
Analisis BSC

No.	Perspektif	Strategi 1: Menerapkan pelayanan aparatur Kecamatan Ngoro yang efektif dan efisien	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	Peningkatan standar kualitas pelayanan aparatur Kecamatan Ngoro	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan dan Kelurahan
3	Perspektif Kelembagaan	-	-
4	Perspektif Keuangan	-	-
No.	Perspektif	Strategi 2: Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Ngoro	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	-	-
3	Perspektif Kelembagaan	Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Kecamatan Ngoro	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
		Peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan, aset dan database Kecamatan Ngoro	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4	Perspektif Keuangan	-	-

Untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Kecamatan Ngoro , maka strategi di atas harus dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan - kebijakan. Linearitas antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Ngoro lima tahun ke depan dijelaskan pada tabel berikut ini.

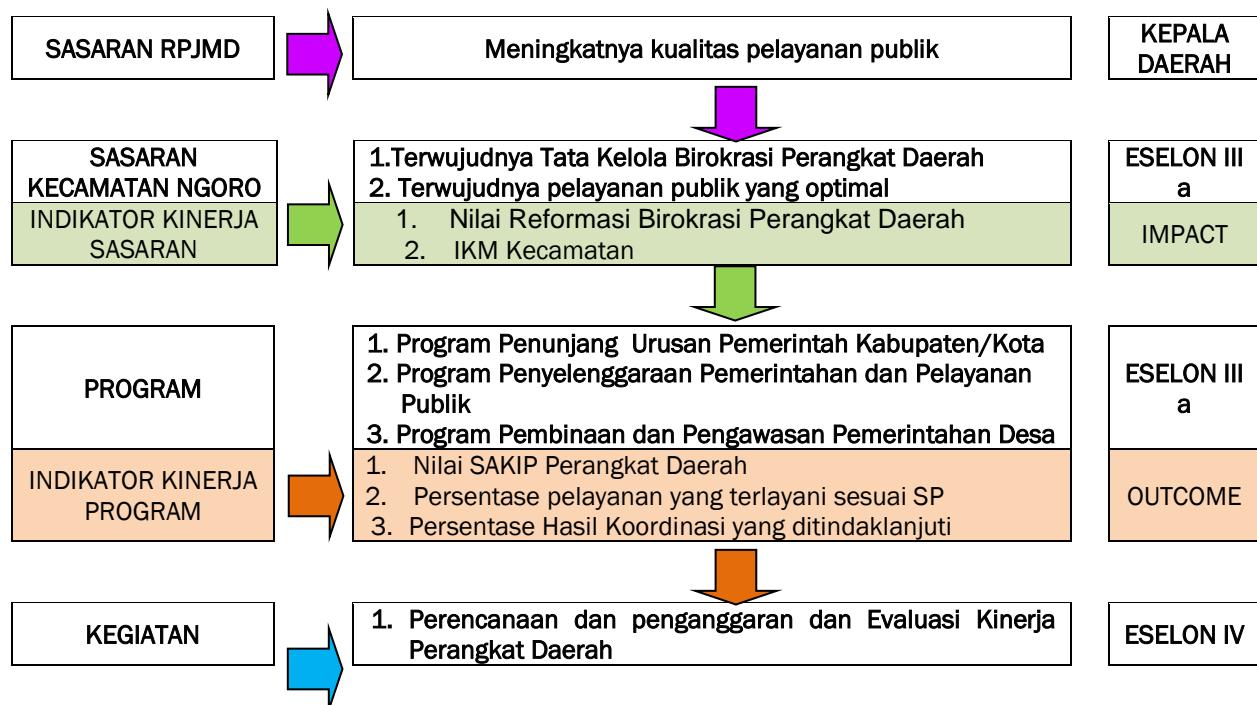
Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			
MISI III : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas Pelayanan dan manajemen ASN Kecamatan	Peningkatan standar kualitas dan manajemen pelayanan Kecamatan Ngoro
	Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang mudah dan cepat serta Sinergitas pelayanan yang berbasis informasi dan teknologi	Peningkatan penggunaan Teknologi informasi sesuai kebutuhan Aparatur Kecamatan.
			Penyediaan pelayanan yang terintegrasi, cepat dan sesuai Standart Pelayanan
			Pemanfaatan secara optimal aplikasi dan teknologi dalam mempercepat pelayanan.

Berikut ini akan digambarkan hirarki akuntabilitas kinerja per sasaran Renstra untuk menunjukkan hubungan antara sasaran strategis RPJMD, sasaran OPD Kecamatan Ngoro, program dan kegiatan. Hirarki akuntabilitas kinerja ini juga menunjukkan level tanggung jawab beserta level akuntabilitas setiap tingkatan.

Gambar 5.3

Hirarki Akuntabilitas Kinerja Sasaran



	<p>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>4. Administrasi Umum Perangkat daerah</p> <p>5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah</p> <p>7. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat</p> <p>8. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah</p>	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	<p>1. Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target</p> <p>2. Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah</p> <p>3. IP ASN Perangkat Daerah</p> <p>4. Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan</p> <p>5. Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan</p> <p>6. Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</p> <p>7. Jumlah pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan</p> <p>8.Jumlah fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat</p>	OUTPUT

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Kecamatan Ngoro ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang dimiliki Kecamatan Ngoro adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- c. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Uraian program dan kegiatan yang direncanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif Renstra ini disajikan sebagaimana ditunjukkan pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel T-C. 27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Ngoro
Kabupaten Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja Pengkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatnya kualitas pelayanan publik				IKM Kecamatan	629.373.960	80	4.072.143.773	82	4.191.143.773	83	4.488.273.837	84	4.799.103.006	85	5.129.940.571	85	5.477.186.411	85	24.085.647.598	Kec. Ngoro	Kec. Ngoro
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah			Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	61	NA	3.779.143.773	61	3.816.143.773	63	4.083.273.837	64	4.369.103.006	65	4.674.940.571	67	5.002.186.411	67	21.945.647.598	Kec. Ngoro	Kec. Ngoro
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,93	78,93	3.779.143.773	79,73	3.816.143.773	80,53	4.083.273.837	81,33	4.369.103.006	82,13	4.674.940.571	82,93	5.002.186.411	82,93	21.945.647.598	Kec. Ngoro	Kec. Ngoro
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang dapat tersusun	13 Dokumen	13 Dokumen	5.000.000	13 Dokumen	10.000.000	13 Dokumen	20.000.000	13 Dokumen	20.000.000	13 Dokumen	20.000.000	13 Dokumen	30.000.000	75 Dokumen	100.000.000	Kec. Ngoro	Kec. Ngoro
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun	7 Dokumen	7 Dokumen	2.000.000	7 Dokumen	5.000.000	7 Dokumen	10.000.000	7 Dokumen	10.000.000	7 Dokumen	10.000.000	7 Dokumen	15.000.000	35 Dokumen	50.000.000	Kec. Ngoro	Kec. Ngoro

				sesuai ketentuan yang berlaku																	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	8 Dokumen	8 Dokumen	3.000.000	6 Dokumen	5.000.00	6 Dokumen	10.000.00	6 Dokumen	10.000.00	6 Dokumen	10.000.00	6 Dokumen	15.000.00	30 Dokumen	50.000.000	Kec. Ngoro	Kec. Ngoro
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	90	NA	3.404.334.813	90	3.402.143.773	92	3.578.273.837	94	3.782.103.006	96	4.032.940.571	98	4.265.186.411	98	19.060.647.598	Kec. Ngoro	Kec. Ngoro
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28 Dokumen	14 Bulan	3.399.334.813	28 Dokumen	3.397.143.773	28 Dokumen	3.568.273.837	28 Dokumen	3.762.103.006	28 Dokumen	4.007.940.571	28 Dokumen	4.235.186.411	28 Dokumen	18.970.647.598	Kec. Ngoro	Kec. Ngoro
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan	30 Dokumen	30 Dokumen	5.000.000	30 Dokumen	5.000.00	30 Dokumen	10.000.00	30 Dokumen	20.000.00	30 Dokumen	25.000.00	30 Dokumen	30.000.00	150 Dokumen	90.000.000	Kec. Ngoro	Kec. Ngoro
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	NA	NA	20.000.000	81	30.000.000	83	40.000.000	86	45.000.000	88	45.000.000	90	90.000.000	90	250.000.000	Kec. Ngoro	Kec. Ngoro
			Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Bintek peningkatan kompetensi ASN yang dilaksanakan	NA	NA	-	2 Bintek	10.000.000	2 Bintek	15.000.000	2 Bintek	20.000.000	2 Bintek	20.000.000	2 Bintek	55.000.000	10 Bintek	120.000.000	Kec. Ngoro	Kec. Ngoro
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	31 Stel	31 Stel	20.000.000	30 Stel	20.000.000	30 Stel	25.000.000	30 Stel	25.000.000	30 Stel	25.000.000	30 Stel	35.000.000	181 Stel	130.000.000	Kec. Ngoro	Kec. Ngoro
			Administrasi Umum	Persentase penyediaan	85%	85%	190.000.000	90%	185.000.000	92%	213.000.000	94%	290.000.000	96%	320.000.000	98%	350.000.000	98%	1.358.000.000	Kec. Ngoro	Kec. Ngoro

			Perangkat Daerah	Administrasi Umum perangkat Daerah sesuai kebutuhan																	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	1 Paket	10.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	5 Paket	60.000.000	Kec. Ngoro	Kec. Ngoro						
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	75.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	78.000.000	1 Paket	120.000.000	1 Paket	130.000.000	1 Paket	150.000.000	5 Paket	528.000.000	Kec. Ngoro	Kec. Ngoro
			Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	30.000.000	60 Bulan	120.000.000	Kec. Ngoro	Kec. Ngoro
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	1 Paket	1 Paket	15.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	35.000.000	1 Paket	35.000.000	5 Paket	140.000.000	Kec. Ngoro	Kec. Ngoro
			Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	NA	NA	0	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	5 Paket	25.000.000	Kec. Ngoro	Kec. Ngoro
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	1 Paket	1 Paket	30.000.000	1 Paket	45.000.000	1 Paket	45.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	60.000.000	1 Paket	60.000.000	5 Paket	260.000.000	Kec. Ngoro	Kec. Ngoro

			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah waktu pemenuhan makanan dan minuman tamu	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	50.000.000	60 Bulan	220.000.000	Kec. Ngoro	Kec. Ngoro						
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	100%	100%	66.808.960	100%	72.000.000	100%	82.000.000	100%	87.000.000	100%	92.000.000	100%	92.000.000	100%	92.000.000	100%	425.000.000	Kec. Ngoro	Kec. Ngoro
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	55.000.000	12 Bulan	60.000.000	12 Bulan	60.000.000	60 Bulan	265.000.000	Kec. Ngoro	Kec. Ngoro		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	2 THL	2 THL	26.808.960	2 THL	32.000.000	10 THL	160.000.000	Kec. Ngoro	Kec. Ngoro										
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	89%	89%	93.000.000	90%	117.000.000	92%	150.000.000	94%	145.000.000	96%	165.000.000	98%	175.000.000	98%	752.000.000	Kec. Ngoro	Kec. Ngoro		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional pendukung tugas sesuai kebutuhan	NA	-	-	1 Kendaraan R2	24.000.000	2 Kendaraan R2	50.000.000	1 Kendaraan R2	40.000.000	2 Kendaraan R2	50.000.000	2 Kendaraan R2	60.000.000	8 Kendaraan R2	224.000.000	Kec. Ngoro	Kec. Ngoro		

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	2 Kendaraan Dinas	2 Kendaraan Dinas	38.000.000	3 Kendaraan	38.000.000	4 Kendaraan	40.000.000	5 Kendaraan	45.000.000	6 Kendaraan	50.000.000	7 Kendaraan	50.000.000	7 Kendaraan	223.000.000	Kec. Ngoro	Kec. Ngoro
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	3 Gedung	3 Gedung	40.000.000	3 Gedung	40.000.000	3 gedung	45.000.000	3 Gedung	45.000.000	3 Gedung	50.000.000	3 Gedung	50.000.000	3 Gedung	230.000.000	Kec. Ngoro	Kec. Ngoro
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasrama Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	1 Paket	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	75.000.000	Kec. Ngoro	Kec. Ngoro
	Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal		IKM Kecamatan		80	293.000.000	82	375.000.000	83	405.000.000	84	430.000.000	85	455.000.000	86	475.000.000	86	2.140.000.000	Kec. Ngoro	Kec. Ngoro	
	7.01.02	Program Penyelenggaran Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	80%	80%	35.000.000	81%	35.000.000	82%	45.000.000	83%	50.000.000	84%	55.000.000	85%	55.000.000	100%	240.000.000	Kec. Ngoro	Kec. Ngoro	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan minimal	400 Pelayanan	400 pelayanan	35.000.000	1.000 pelayanan	35.000.000	1.110 pelayanan	45.000.000	1.200 pelayanan	50.000.000	1.250 pelayanan	55.000.000	1.300 pelayanan	55.000.000	5.000 pelayanan	240.000.000	Kec. Ngoro	Kec. Ngoro	

			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	15 Pelayanan	15 Pelayanan	10.000.00 0	10 Pelayanan	5.000.0 00	10 Pelayanan	10.000.0 00	10 Pelayana n	10.000. 000	10 Pelayanan	15.000. 000	10 Pelayan an	15.000. 000	50 Pelayan	55.000. 000	Kec. Ngoro	Kec. Ngoro	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	385 Pelayanan	385 Pelayana n	25.000.00 0	990 Pelayan an	30.000. 000	1100	35.000.0 00	1190 Pelayana n	40.000. 000	1240 Pelayanan	40.000. 000	1290 Pelayan an	40.000. 000	5810 Pelayan an	185.000 .000	Kec. Ngoro	Kec. Ngoro	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat dan desa yang dapat terfasilitasi kecamatan	85%	85%	100.000.0 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinas pemberdayaan desa			100.000.0 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat		10 Kegiat an	60.000.00 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan	Jumlah pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat		5 Pembi naan	40.000.00 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Percentase koordinasi ketenraman dan ketertiban yang dapat terfasiitasi kecamatan		80%	71.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi keamanan dan ketertiban umum		16 Kegiatan	71.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		12 kegiatan	36.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		4 Kegiatan	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7.01.03	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Percentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		85	87.000.000	81%	340.000.000	82%	360.000.000	83%	380.000.000	84%	400.000.000	85%	420.000.000	85%	1.900.000.000	Kec. Ngoro	Kec. Ngoro		

			7.01.0 3.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintah an, Pembangun an, Ketentram an, Ketertiban umum dan perlindunga n masyarakat, kesejahtera an masyarakat	0	83 Fasilit asi	87.000.00 0	52 Fasilita si	340.00 0.000	52 Fasilita si	360.000. 000	52 Fasilitasi	380.00 0.000	52 Fasili tasi	400.00 0.000	52 Fasili tasi	420.00 0.000	260 Fasili tasi	1.900.0 00.000	Kec. Ngoro	Kec. Ngoro	
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah fasilitasi Penyusunan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa		7 Fasilit asi	14.000.00 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintaha n Desa		19 Fasilit asi/De sa	29.000.00 0	10 Fasilitas i	60.000. 000	10 Fasilitas i	65.000.0 00	10 Fasilitasi	70.000. 000	10 Fasili tasi	80.000. 000	10 Fasili tasi	80.000. 000	50 Fasili tasi	355.000 .000	Kec. Ngoro	Kec. Ngoro	
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna an Aset Desa		19 Fasilit asi / Desa	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah dengan Pembanguna n Desa		19 Fasilit asi / Desa	12.000.00 0	8 Fasilitas i	60.000. 000	8 Fasilitas i	65.000.0 00	8 Fasilitasi	70.000. 000	8 Fasili tasi	75.000. 000	8 Fasili tasi	80.000. 000	40 Fasili tasi	350.000 .000	Kec. Ngoro	Kec. Ngoro	

			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Progam dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		19 Fasilitasi	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 Fasilitasi	-	-	10 Fasilitasi	80.000.000	10 Fasilitasi	80.000.00	10 Fasilitasi	85.000.000	10 Fasilitasi	85.000.000	10 Fasilitasi	90.000.000	50 Fasilitasi	420.000.000	Kec. Ngoro	Kec. Ngoro	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	24 Fasilitasi	-	-	24 Fasilitasi	140.000.000	24 Fasilitasi	150.000.000	24 Fasilitasi	155.000.000	24 Fasilitasi	160.000.000	24 Fasilitasi	170.000.000	120 Fasilitasi	775.000.000	Kec. Ngoro	Kec. Ngoro	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 yakni Tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah serta Sasaran 3.1.2 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, maka ditetapkan :

Tujuan OPD : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran OPD : 1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah

2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal

Dalam rangka mendorong pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut, Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto menerapkan Indikator Kinerja Sasaran OPD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel T-C.28 berikut ini.

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	82	83	84	85	86	86
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	NA	61	63	64	65	67	67
3	Nilai IKM Kecamatan	80	82	83	84	85	86	86

BAB VIII PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang kan dilaksanakan dalam periode tahun 2021 - 2026. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana stratejik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Stratejik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Ngoro.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Ngoro.

Meskipun rentsra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.



